

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI
BARANG BERTUAH (AZIMAT)**

(Studi di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ROMADONI ADI SAPUTRA

NPM : 1521030271

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Drs. Irwantoni, M. Hum.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

1441 H/ 2019 M

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menegakkan *Hablum Min an-Nas*. Salah satu kebutuhan dalam muamalah adalah jual beli. Dalam hal ini adalah jual beli barang bertuah (*azimat*). Terjadinya praktik jual beli tersebut dilatarbelakangi karena adanya motivasi pembeli, *pertama*, sebagai koleksi barang pusaka, dan *kedua*, untuk diambil manfaatnya (*tabbaruk*) yang dipercaya dapat membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Agar jual beli berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka dalam muamalah penjual harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli, baik objek barang bertuah ataupun manfaat barang bertuah yang diinginkan. Dalam Islam disyariatkan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, transaksi jual beli juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorat dalam hidup bermasyarakat. Islam pada dasarnya menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.

Melihat dari latar belakang masalah di atas, muncul permasalahan yang *pertama*, apa yang dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bertuah?. Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bertuah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Dan penelitian ini bersifat normatif yaitu dengan mendekatkan masalah-masalah yang diteliti dengan norma-norma yang berada di dalam ketetapan hukum Islam. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara pendekatan induktif yaitu mengemukakan fakta yang bersifat khusus dan di akhiri kesimpulan menggunakan teori yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) yang dilakukan Mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat hukumnya boleh, asal dalam transaksi jual beli bertujuan hanya sebagai koleksi. Namun, transaksi jual beli tersebut dapat menjadi dilarang, jika di niatkan untuk diambil manfaatnya atau dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya atau pembelinya. Pelarangan tersebut karena berdasarkan pada kaidah fikih dan tujuan transaksi jual beli yang tidak dibenarkan syara' dan dapat berdampak buruk terhadap keimanan pembeli dan orang lain.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PERSETUJUAN

Nama : **Romadoni Adi Saputra**
NPM : **1521030271**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual
Beli Barang Bertuah (*Azimat*)" (Studi di Desa
Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031002.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002.

Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

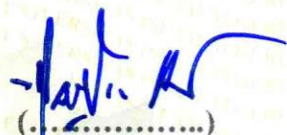
Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531 78042

PENGESAHAN

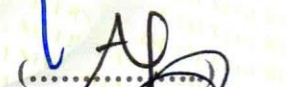
Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah (Azimat)** (Studi di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Disusun oleh **Romadoni Adi Saputra**, Npm 1521030271, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 31 uli 2019 ,Ruang Sidang 02 Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASHAH

Ketua : Marwin, S.H., MH.

()

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

()


Penguji I : Dr. H. Muhammad Rusfi. M. Ag.

()

Penguji II : Drs. H. Irwatoni. M. Hum.

()

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. K.H. Khiruddin, M. H.
NID. 196210219930310002

MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Katakan (Muhammad): marilah Aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun”. (QS. Al-An’am [6]: 151)

“Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepada-Nya”

- Imam Syafi'i -



PERSEMBAHAN

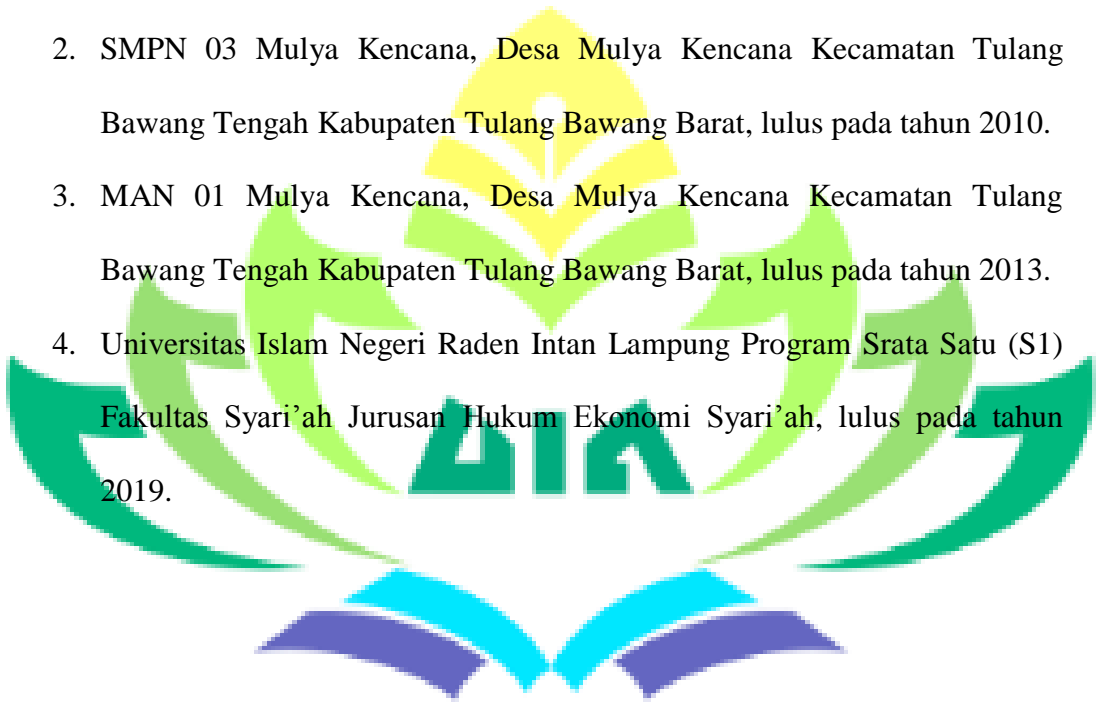
Alhamdulillahirobbi'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Rofi'i dan Ibu Runiti yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang do'a dan motivasi Bapak dan Ibu yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Ku ucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakakku Tersayang Susi Susanti dan Suaminya Supriyadi dan Keponakanku Tersayang Avika Anggraini yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta menjadi pelipur hatiku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Romadoni Adi Saputra**, lahir di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat – Lampung, lahir pada 12 Februari 1995, anak kedua dari dua saudara, dari pasangan Bapak Rofi'i dan Ibu Runiti. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDN 05 Mulya Kencana, Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2007.
2. SMPN 03 Mulya Kencana, Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2010.
3. MAN 01 Mulya Kencana, Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, lulus pada tahun 2013.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Srata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, lulus pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah (Azimat)**. Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dijumpai kebenarannya maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena tidak sengaja dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran dan koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. KH. Khiruddin, M. H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin. M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah.
3. Bapak Drs. Irwantoni, M. Hum. Selaku pembimbing I, dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si. Selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
5. Kedua orangtuaku, kakak-kakakku dan teman-teman terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
6. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah angkatan 2015, sahabat-sahabat kelas Hukum Ekonomi Syari'ah B Agiel, Muhammad Abdul Aziz, Rendi Karno, Agung Tri Pratama, Sukron Makmun, Tri Handoko, Muhammad Fiqri Adira, Ahmad Fauzan, Ja'far Sodik, Andika Mahesa, Muhamad Andriansyah, Dila Martanti, Riska Anggrani, Nurul Amelia, Wiwit Ayu Ningsih, Anisa Rahmawati, Yosika, Anis Faizah, Ade Mareta, Bella Dwi Putri, Yolan Melati, Yuli Sri Lestari, Siti Izzah Khomariah, Siti Hanifah, Dini Andriyani, Juliana, Anisa Mila Diena, Puspita Sari, Nur Tiara Sari, Yeyen, Purnama Lestari, Kautsar Septia Wulandari, Fitri Khasanah, Ayu Khodijah, Lugita Anggraini, Dessy Putri Ningsih, sahabat-sahabat kontrakan Yosa Adi Prasetya, Aldinayan Smile, Saiful Nugraha, Marzha Dwi Syahroni, Bendry Rizqullah, dan Aziz Zul, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.

7. Teman-teman KKN UIN Raden Intan Lampung kelompok 89 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan selama ini.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penyusun

Romadoni Adi Saputra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENEGASAN JUDUL	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam Tentang Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Syarat Sah Jual Beli	26
5. Macam-Macam Jual Beli	28
6. Sifat-Sifat Jual Beli	32
7. Jual Beli Yang Dilarang.....	38
8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	40
B. Hukum Islam Tentang Akad	42
1. Pengertian Akad.....	42
2. Dasar Hukum Akad	45
3. Rukun dan Syarat Akad	49
4. Macam-Macam Akad	53
5. Akibat Hukum Akad	56
6. Berakhirnya Akad	57

C. Tinjauan Umum Barang Bertuah	58
1. Pengertian Barang Bertuah	58
2. Macam-Macam Barang Bertuah	69

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mulya Kencana	71
B. Letak Geografis Desa Mulya Kencana	73
C. Pengertian Barang Bertuah di Masyarakat Mulya Kencana	74
D. Akad Jual Beli Barang Bertuah	76
E. Penetapan Harga Barang Bertuah	77
F. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Barang Bertuah di Desa Mulya Kencana	78

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Barang Bertuah	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bertuah di Desa Mulya Kencana	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN TURNITIN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam memahami skripsi yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah”**, penulis perlu memberi penegasan dari pengertian istilah judul skripsi tersebut, sebagai berikut:

1. Hukum Islam sendiri merupakan sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan Sunah Rasul baik yang langsung maupun tidak langsung yang langsung mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.¹
2. Jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijârah*, *al-mubâdalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (*syari'ah*) ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung sudut pandangnya masing-masing.

Menurut Ibnu Qadamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Imam Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mâl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.²

¹Abdullah Ahmed al-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 90.

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 75

3. Barang bertuah (*azimat*) menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) barang (tulisan) yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal sakit dan sebagainya.³

Berdasarkan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah** (Studi di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Desa Mulya Kencana merupakan salah satu dari 19 Desa yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sementara itu, Tulang Bawang Tengah merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Alasan objektif
 - a. Praktik jual beli barang bertuah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana jual beli tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang hukum praktik jual beli barang bertuah tersebut, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut melalui sudut pandang hukum Islam.
 - b. Penulis membahas judul skripsi ini karena judul ini belum pernah dibahas, oleh karena itu perlu mengkajinya.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 106

2. Alasan subjektif

- a. Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik jual beli barang bertuah menurut hukum Islam.
- b. Permasalahan yang ada di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sesuai dengan jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *Hablum Min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *Hablum Min an-Nas*. Yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi.⁴

Dalam hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. Karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia untuk memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia.⁵

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175.

⁵ *Ibid*, h. 177

Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٦

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*. (Q.S. An- Nisa’: 29).

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan hak milik dengan cara pertukaran. Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi unsur-unsur yang membentuk jual beli. Selain unsur ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur tersebut. Unsur bisa disebut dengan rukun, karena keduanya merupakan pembentuk akad.⁶

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara: **pertama**, yaitu pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling suka. Pertukaran atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan yang **kedua**, yaitu memindah milik dengan ganti yang dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan

⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Graemedia Persada, 2015), h.

disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁷

Dalam perkembangan praktik jual beli di masyarakat banyak objek yang dijadikan sasaran jual beli, seperti contohnya barang bertuah. Barang bertuah sendiri artinya benda yang memiliki manfaat lain selain manfaat benda itu secara fisik. Seperti yang diketahui bahwa di masyarakat barang bertuah adalah benda keramat turun-temurun atau sepeninggalan dari nenek moyang yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan, sehingga barang bertuah tersebut memiliki daya tarik tersendiri di masyarakat, khususnya di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk diperjualbelikan sebagai koleksi maupun sebagai benda atau barang yang membawa keberuntungan.

Di masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat barang bertuah hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki keahlian dibidang spiritual. Maka masyarakat yang tidak memiliki keahlian spiritual sangat jarang mempunyai barang bertuah tersebut. Sehingga masyarakat yang tertarik dengan barang bertuah dapat membelinya sebagai koleksi ataupun dimanfaatkan sebagai benda atau barang yang membawa keberuntungan. Dalam kasus jual beli, pemilik dan pembeli barang bertuah sering kali menggunakan bahasa mahar untuk menentukan harga atau barang lain yang setara untuk pemindahan hak atas barang bertuah

⁷Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139-140

tersebut. Bahkan untuk barang bertuah berupa keris, masyarakat memberi mahar/membeli dengan harga Rp500.000 sampai Rp1.000.000 bahkan lebih, tergantung dengan ketertarikan dari masyarakat. (Menurut Mbah Borok penggunaan kata mahar itu sendiri sebenarnya hanyalah sebuah istilah dari masyarakat untuk menghargai atau dengan kata lain hanya penentuan harga atau pertukaran barang bertuah dengan barang lain yang setara nilainya).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli barang bertuah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Praktik Beli Barang Bertuah (Azimat)”**. Karena menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang hukum praktik jual beli barang bertuah tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bertuah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan barang bertuah di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bertuah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat terkait tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli barang bertuah.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 tahapan yang dilakukan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*feild research*) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian, maka penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini

adalah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi. Misalnya koran, jurnal media elektronik, surat kabar, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat normatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menginterpretasikan masa lampau. Walaupun data yang dianalisis sudah lewat namun hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menginterpretasi atau memprediksi kejadian sekarang.⁹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai jual beli barang bertuah dengan dijelaskan pula pandangan hukum Islam tentang kejadian koteks masalah tersebut.

2) Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari tangan pertama dan data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer ini, disebut dengan data

⁸Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 302

⁹*Ibid.*, h. 332.

asli atau data baru.¹⁰ Data ini secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian pada penulis. Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan para penjual dan pembeli barang bertuah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.¹¹ Data sebagai referensi atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian dipilih antara teori dan praktik tentang jual beli barang bertuah.

3) Populasi dan Sempel

a. Populasi

Menurut Arikunto Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.¹²

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

¹⁰Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

¹¹*Ibid.*,

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 102

Bawang Barat yang terdiri 6 orang. Dalam hal ini 1 penjual, 4 pembeli barang bertuah dan 1 tokoh agama masyarakat.

b. Sampel

Menurut Arikunto berpendapat bahwa Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian populasi.¹³ Arikunto menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.¹⁴ Mengingat populasi sebanyak 6 orang, maka 1 penjual, 4 pembeli dan 1 tokoh agama di Masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dijadikan sampel penelitian, sehingga merupakan penelitian Populasi.

4) Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengumpulan data dengan observasi langsung yakni dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada bantuan

¹³*Ibid.*, h. 104

¹⁴*Ibid.*, h. 107

alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik jual beli barang bertuah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara dimana peneliti menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.¹⁶ Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai penjual barang bertuah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan wawancara dengan penjual barang bertuah di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli Barang bertuah. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

¹⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-14 (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 70

¹⁶Iqbal Hasan, *Op. Cit.*, h. 85

5) Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

b. Koding

Koding adalah mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Tujuannya adalah sebagai penandaan tanda pada kata-kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau symbol atau kata-kata tertentu yang menunjukan golongan atau kelompok atau klarifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. Sistematis

Sistematis adalah data yang diuraikan atau dirumuskan teratur dan logis dalam sistemnya berarti utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang mencakup objeknya.¹⁷ Metode ini digunakan untuk melakukan pengelompokan data yang telah telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op. Cit.*, h. 153-154

6) Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan menganalisa data akan menghasilkan penelitian yang akurat. Analisa data adalah analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, dengan menggunakan metode analisa data yang sesuai dengan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang bertuah dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa yang menerangkan teori yang bertolak dari hal-hal yang khusus dan menentukan teori yang bersifat umum.¹⁸ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik jual beli barang bertuah yang dikaji dalam hukum Islam dan hasil analisisnya dituangkan kedalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematis pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁸*Ibid.*, h. 155

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*). Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain).¹⁹ Sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²⁰

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai', at-tijarah, al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan *merugi*”. (QS. Al-Faathir [35]: 29).

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²¹

¹⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Loc. Cit., h. 75

²⁰Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253

²¹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Loc. Cit.*, h. 128

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas atau bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²²

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mâl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighâh ijâb qabûl*).²³

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), h. 69-70

²³Ismail Nawawi, *Op. Cit.*,

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²⁴

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) merupakan suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.²⁵

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara'.
- 2) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar merelakan.
- 3) Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
- 4) Penukaran benda dengan benda yang lainnya dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantiannya dengan cara yang dibolehkan.
- 5) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *iqabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.

²⁴Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 139

²⁵R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1

- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, ijma', dan fikih kaidah yakni:

a. *Al-Qur'an*, di antaranya:



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

²⁶Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143

²⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisâ’ [4]: 29).

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan diperbolehkan dalam mu’amalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh keuntungan disamping juga bisa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, perniagaan yang tidak bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba.²⁸

b. As-Sunah, di antaranya:

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ
قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”²⁹

²⁸Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 129.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2007), h. 113

Hadist Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar merelakan.”

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi Saw. bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shidiqin dan syuhadā’.”³⁰

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang tergantung didalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya.³¹

c. *Ijma’*

³⁰Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

³¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

d. Kaidah Fiqh, di antaranya:

لَأَصْلُ فِي الْمِعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.*”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu’amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.³³

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَتَّاعِدَيْنِ وَتَتَبِعُهُ مَا إِنْ تَرَ مَاهُ بِاتِّعَاقٍ

Artinya: “*Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan*”.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75

³³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga tertipu.³⁴

Dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa, dalam sahnya akad jual beli harus adanya keridhaan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut pendapat ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadikan rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.³⁵

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual

³⁴*Ibid.*,

³⁵Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 114-115

beli menjadi sah menurut hukum Islam.³⁶ Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:³⁷

- a. *Al-‘aqidani* atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
 - 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya.
 - 2) Pembeli, yaitu pemilik harta yang membeli barang.
- b. *Mauqud ‘alaih*, atau obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang dijualbelikan.
- c. *Sighat*, atau lafazd akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Sedangkan para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³⁸

Syarat jual beli sendiri mencakup:

- 1) Syarat yang berkaitan penjual dan pembeli, di antaranya:
 - a. Berakal dan dapat membedakan (memilih).

³⁶M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81

³⁷Abdurrahman Aljaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001), h. 16

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 102

Akad orang gila, mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika, maka akat yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah, hanya sahnya tergantung kepada izin walinya.³⁹

b. Ridha antara penjual dan pembeli.

Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan. Jual beli dinyatakan sah jika saling ridha antara penjual dan pembeli sebagai firman Allah Ta'ala:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka (saling ridha) diantara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4] : 29).

Namun jika ada paksaan dalam jual beli dengan cara yang benar, semisal seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang orang yang jatuh pailit kerana utang untuk melunasi utang-utangnya, maka semisal itu diperbolehkan.

c. Orang yang melakukan akad diizinkan untuk membelanjakan harta.

Mereka yang diizinkan adalah:

1) Merdeka;

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 51

- 2) Mukallaf (telah terbebani syari'at);
- 3) Mempunyai sifat *rusydu* (dapat membelanjakan harta dengan baik).⁴⁰

d. Baligh.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalanya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan" (Q.S. an-Nisa [4]: 5)

Ayat diatas menunjukan bahwa orang yang bukan ahli tasawuf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan (*Ijab Qabul*).⁴¹

- 2) Syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual beli, di antaranya:⁴²

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai. Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi Saw:

⁴⁰Muhammad Abduh Tausikal, *Panduan Fikih Muamalah: Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2013), h. 22-23

⁴¹Sudarto, *Op. Cit.*, h. 270

⁴²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 52

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيِّتَةِ وَالْخَمْرَ وَالْأَصْنَامَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan patung". (Muttafaq Alaih).

- b. Barang yang diperjualbelikan maupun alat tukarnya adalah suatu yang dapat diserahkan. Sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan, jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.⁴³

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁴⁴

4. Syarat Sah Jual Beli

- a) Syarat Umum

Syarat umum yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah

⁴³Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 367-368

⁴⁴Mustad Ahmad, *Ekonomi Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h.

syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan juga terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu teridakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudaran, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.⁴⁵

b) Syarat Khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat:

1. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang.
2. Harga awal harus diketahui.
3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
4. Barang yang diperjualbelikan menjadi tanggung jawabnya penjual.

c) Syarat *Lujum* (Kemestian)

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari “*khiyar*” (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁴⁶

Sedangkan, dalam buku Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Syarat-syarat bagi sahny suatu *bai'*, yaitu:

1. Syarat Kecakapan Para Pihak.

⁴⁵Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 146

⁴⁶*Ibid.*,

2. Kesempatan Para Pihak.
3. Penawaran dan Penerimaan.
4. Isi Penerimaan dan Penawaran.
5. Kepemilikan Barang.
6. Spesifikasi Barang.
7. Indikasi Barang.
8. Eksistensi Barang.
9. Pemindahtanganan.
10. Penguasaan Barang Oleh Penjual.
11. Kehalalan Barang.
12. Penyerahan Barang.
13. Harga Barang.
14. Jual Beli Bersyarat.⁴⁷

Adapun dasar yang dijadikan prinsip dalam mu'amalah kehartabendaan, ada dua hal, yaitu:

1. Melarang memakan makanan yang batil.
2. Saling merelakan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^{٤٧}

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 185

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.* (QS. An-Nisa’ : 29)

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan diperbolehkan dalam mu’amalah yang Islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh keuntungan disamping juga bisa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, perniagaan yang tidak bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba.⁴⁸

5. Macam-Macam Jual Beli

a. Dilihat Dari Sisi Objek

1) Jual beli *al-Muqayadhah*

Muqayadhah yakni jual beli yang dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*barter*).⁴⁹

2) Jual beli *Sharf*

Sharf berarti jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain, baik sejenis maupun tidak sejenis. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Juzayri, *Sharf* adalah jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau jual beli salah satunya dengan yang lainnya. *Sharf* ini

⁴⁸Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 129.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 112

merupakan jual beli (*bay'*) pada umumnya, sehingga rukun jual beli diberlakukan pula dalam *Sharf*.⁵⁰

3) Jual beli *Mutlaqah*

Mutlaqah yakni pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.⁵¹

b. Dilihat Dari Segi Cara Menetapkan Harga

1) Jual beli *Musawwamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

2) Jual beli *Amanah*, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:⁵²

a) Jual beli *Murabahah*, yaitu akad jual beli atas barang dimana penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan sesuai jumlah yang diharapkan. Dalam akad *Murabahah*, penjual yang menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁵³

b) Jual beli *Muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui,

⁵⁰Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 50

⁵¹Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 125

⁵²Yadi Janwari, *Op. Cit.*,

⁵³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

c) Jual beli *Tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.⁵⁴

4) Jual beli *Muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi sebagai pembeli. Sedangkan, jual beli *Munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁵⁵

c. Dilihat Dari Segi Pembayaran

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

⁵⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, h . 229

⁵⁵Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 82

- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
- a) Jual beli *Salam*, yaitu jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya dimasa mendatang.⁵⁶ Dalam praktiknya, pembayaran ba'i salam tidak selalu dalam bentuk uang, dapat saja dalam bentuk lain. Syaratnya, barang yang digunakan untuk membayar tidak sejenis dengan barang yang dibeli. Jadi, tidak boleh pembelian pada secara salam dibayar dengan padi karena yang demikian itu adalah riba. Untuk barang yang tidak dapat dimakan, ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki tidak membolehkannya, sedangkan ulama mazhab Syafi'i membolehkannya.⁵⁷
- b) Jual beli *Istishna'*, merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari orang lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui dahulu.⁵⁸

⁵⁶Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 92

⁵⁷*Ibid.*, h. 93

⁵⁸Ismail, *Op. Cit.*, h. 146

- 4) Jual beli yang penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

6. Sifat-Sifat Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *gharar shahih* yakni:

a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang disyaratkan menurut asal dan sifat sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.⁵⁹ Namun, jual beli yang sah dapat menjadi dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut:

- 1) Menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain;
- 2) Menyempitkan gerakan pasar;
- 3) Merusak ketentraman umum.⁶⁰

b. Jual Beli *Gharar Shahih*

Jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128

⁶⁰Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:⁶¹

1. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Akad jual beli *bathil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.⁶² Jual beli *bathil* ada beberapa macam, yakni:

a) Jual beli *ma'dum* (sesuatu yang tidak ada)

Jual beli *ma'dum*, yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang *bathil* berdasarkan hadist Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar r.a Sesungguhnya Rasulullah Saw, melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya”.⁶³

b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli

Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaran yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh

⁶¹Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 71

⁶²*Ibid.*,

⁶³Gemala Dewi dkk, *Op. Cit.*, h. 104

ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' gharar* (jual beli tipuan).⁶⁴

c) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan. Jual beli mengandung tipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak di ketahui hakikat dan kadarnya.⁶⁵ Adapun yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

(1) Jual beli *muzâbanah*

Jual beli *muzâbanah* adalah jual beli sesuatu yang yang di ketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah-buahan yang masih dalam pelepahnya, misalnya.⁶⁶

Berdasarkan hadist Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ، وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا

Artinya: "Dari Abdullah ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah menjual buah yang masih di pelepahnya dengan takaran dan jual beli anggur yang masih di tangkainya dengan takaran."⁶⁷

(2) Jual beli *mulâmasah* dan *munâbadzah*

⁶⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Op. Cit., h. 122

⁶⁵Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (jakarta: Prenada Media, 2015), h. 159

⁶⁶Muhammad Sharif Chaudry, Op. Cit., h. 126

⁶⁷Rozalinda, Op.Cit., h. 73

Jual beli *mulâmasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk, dan kualitas barang. Apa yang disentuh itulah hak pembeli.⁶⁸ Sedangkan, jual beli *munâbadzah*, yaitu jual beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara itu tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan (*al-jahalah*).⁶⁹

(3) Jual beli *bay' al-hâdhir li al-bâdî*

Jual beli *bay' al-hâdhir li al-bâdî* yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli dari harga pasar sehingga mendapat keuntungan yang banyak.⁷⁰

(4) Jual beli *an-Najasy*

Jual beli *an-Najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengalabui orang lain.⁷¹

⁶⁸Muhammad Sharif Chaudry, *Op. Cit.*, h. 126

⁶⁹Idri, *Op. Cit.*, h. 170

⁷⁰*Ibid.*, h. 162

⁷¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 195

- d) Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (*bay' al-najis* dan *bay' al-mutanajjis*).

Jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan (*bay' al-najis* dan *bay' al-mutanajjis*). Seperti jual beli *khamar*, babi, bangkai, dan darah, karena barang-barang tersebut bukan termasuk kategori harta benda (*mâl*) dan ini dilarang. Beberapa pendapat dari Imam Hanafi (seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*) membolehkan jual beli binatang buas seperti jual beli anjing, macan tutul, singa, srigala, dan kucing, karena binatang-binatang tersebut masuk dalam kategori (*mâl*) harta benda. Akan tetapi, penjualan binatang-binatang tersebut harus disertai dengan syarat, bahwa binatang tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai ajaran syariat.⁷²

- e) Jual beli *urbun*

Jual beli *urbun*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual.⁷³

- f) Jual beli air

⁷²Ika Yunia Fauzi, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 248

⁷³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 131

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap harta benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, tanah. Seluruh harta benda, seperti air laut, sungai, dan sumur umum tidak boleh diperjualbelikan karena tergolong *mal mubah*.⁷⁴

2. Jual beli *fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu shahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka itu batil. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:⁷⁵

- a) Jual beli *majhul* (barangnya secara global tidak diketahui).
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- c) Jual beli barang yang (tidak ada) di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- e) Jual beli dengan barter harga yang diharamkan.

⁷⁴*Ibid.*, h. 133

⁷⁵*Ibid.*, h. 134

- f) Jual beli *'ajal*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan kemudian dibeli kembali dengan tunai.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain dengan tujuan untuk pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
- h) Melakukan dua akad jual beli dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.⁷⁶

7. Jual Beli Yang Dilarang

Secara umum, *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.⁷⁷

Dalam buku Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. M. A. tentang Hukum Perdata di Indonesia. Muhammad Rasulullah Saw. melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan

⁷⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 106-107

⁷⁷Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Op. Cit.*, h. 154

sebagai akibat transaksi jual beli.⁷⁸ Hal ini diungkapkan beberapa contoh jual beli yang dilarang, sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang dibeli sebelum diterima barangnya.
- b) Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain.
- c) Membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya.
- d) Memperjualbelikan barang haram dan najis.
- e) Jual beli *gharar* (yang terdapat unsur penipuan di dalamnya).
- f) Dua bentuk transaksi pada satu barang atau harta.
- g) Membeli sesuatu barang atau harta kepada seseorang yang sedang menuju ke pasar.
- h) Jual beli *Ijon* adalah jual beli barang yang belum layak diperjualbelikan.⁷⁹

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, disini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: (1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasar; (3) Merusak ketentraman umum.⁸⁰

- 1) Membeli barang harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapatembali barang itu.

⁷⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 146-147

⁷⁹*Ibid.*, h. 148-149

⁸⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 284

- 2) Membeli barang yang masih dalam masa *khiyar* orang lain.
- 3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.⁸¹

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling bantu antara penjual dan pembeli dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat terhindar dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli dapat mendapat rahmat dari Allah swt.⁸²

b. Hikmah Jual Beli

⁸¹*Ibid.*, h. 285

⁸²Sudarto, *Op. Cit.*, h. 287

Allah SWT membolehkan atas jual beli sebagai peluang dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari saling tukar, dimana seorang memberi apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing.⁸³

Menurut Dr. H. A.Khamedi Ja'far, S.Ag.,M.H dalam buku hukum perdata di Indonesia, manfaat dan hikmah jual beli yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

⁸³*Ibid.*, h. 288

- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁸⁴

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, kerana pada umumnya kebutuhan seseorang sangat berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Dapat diartikan bahwa hikmah diperbolehkan jual beli adalah menghindari manusia dari kesulitan bermu'amalah.⁸⁵

B. Hukum Islam Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab adalah **الْعَقْدُ** yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan.⁸⁶ Kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu.⁸⁷ Bisa juga berarti:

الرَّ بَطُّ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَوْ كَانَ رِبْطًا حَسْبًا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبَيْنِ

⁸⁴Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 121-122

⁸⁵Sudarto, *Op. Cit.*, h. 256

⁸⁶Muhammad Maksum, "Model-Model Kontak Dalam Produk Keuangan Syari'ah", Al-Adalah. Vol. XII No. 1, Juni 2014, h. 50. Tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>

⁸⁷*Ibid.*, h. 50.

Artinya: *“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”*⁸⁸

Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- b) Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c) Menurut Syaiful Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- d) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸⁹

Dari pengertian mengenai akad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri tentang suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan sesuai dengan

⁸⁸Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 43

⁸⁹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Loc. Cit.*, h. 144

prinsip syariah. Akad terwujud karena adanya *ijab* dan *qabul* serta adanya kesesuaian dengan prinsip syariah.⁹⁰

Menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian **umum**, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Sementara dalam artian **khusus**, diartikan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objek atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lain sesuai syara' dan berdampak pada objeknya.⁹¹ *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹²

Sedangkan menurut istilah akad memiliki arti keterikatan keinginan diri dengan suatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁹³

⁹⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 130

⁹¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6

⁹²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 52

⁹³Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Sahwi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 26

Adapun akad menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.⁹⁴

2. Dasar Hukum Akad

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi “akad” adalah sebagai berikut:⁹⁵

a. *Al-Qur'an*, di antaranya:

Di antaranya adalah Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Mâidah [5]: 1).

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “...Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”. (QS. Al-Isra’ [17]: 34).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang pikulnya) dan janjinya”. (QS. Al-Mu’minun [23]: 8).

⁹⁴R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Balai Pustaka, 2015), h. 338

⁹⁵Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 7

Pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun demikian, kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad ada yang berhak mutlak, tanpa batas, selama tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanabilah dan Malikiyah, dan menurut ulama Hafiyah dan Syafi'iyah, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan dengan akad itu sendiri.⁹⁶

b. As-Sunah, di antaranya:

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Al-nasai dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُوثِمَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasanya Nabi Saw., bersabda: Empat hal bila ada pada seseorang, maka dia adalah seorang yang munafik tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka ada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat ia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang". (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Nasai dari Abdullah bin Umar r.a.).⁹⁷

⁹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Op. Cit., h. 105

⁹⁷Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الذَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْ أُمَّ يُنْصَبُ بِغَدْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخاري ومسلم
عن ابن عمر رضي الله عنهما)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., berkata: aku mendengar Nabi Saw., bersabda: bagi setiap penghianat akan diberikan bendera pada hari kiamat yang ditegakan sesuai kadar penghianatannya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.).⁹⁸

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw., bersabda:

أَدَالَمَانَةً إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ

Artinya: “Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kau khianati orang mengkhianatimu (sekalipun)”.⁹⁹

c. *Ijma'*

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual jual. berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasikan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan makna umum “akad” sebagaimana disebutkan, maka jual beli, sewa menyewa, dan semua akad *mu'awadhah* lainnya, dan nikah dinamakan dengan “akad”. Karena setiap pihak berkomitmen

⁹⁸*Ibid.*,

⁹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Alma'arif, 1997), Cet. 7, h. 69

untuk memenuhi janjinya dan terikat dirinya untuk melaksanakannya suatu perjanjian.¹⁰⁰

Berdasarkan makna khusus “akad” sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil dapat dipahami bahwa “akad” adalah setiap kehendak yang timbul dari kedua belah pihak berdasarkan suka dengan suka yang di buktikan melalui ijab qabul. Dengan demikian kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan haknya masing-masing.¹⁰¹

d. Kaidah *Fiqh*, di antaranya:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَايَ الْمُتَعَاذِلَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَاذٍ

Artinya: “*Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan*”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi akan dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga tertipu.¹⁰²

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ الْمَقَاصِدُهَا وَالْمَعَانِي لَا لَفْظُ وَالْمَبَانِي

Artinya: “*Yang dianggap (penting) dalam akad adalah maksud dan makna bukan lafal dan bentuk perkataan*”.

Berdasarkan kaidah ini, hasil yang diperoleh dari akad tidak tergantung kepada lafal yang digunakan para pihak yang berakad, tetapi

¹⁰⁰Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 3

¹⁰¹*Ibid.*, h. 5

¹⁰²Djazuli, *Op. Cit.*, h. 128

tergantung pada maksud dan makna hakiki dari lafal yang diucapkan tersebut. Kaidah ini diterapkan bila terjadi perbedaan antara maksud tujuan para pihak yang berakad dengan lafal yang diucapkan, yang dipegang adalah maksud atau niat para pihak.¹⁰³

3. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁰⁴ Suatu akad baru terbentuk bila terpenuhi rukun (unsur) nya. Adapun unsur akad yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad (*Al- 'Aqidain*)

Al- 'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqiqi, para ulama ahli Usul Fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 5 (lima) tahap Subjek Hukum:

1. Marhalah al-Janin
2. Marhalah al-Saba
3. Marhalah al-Tamyiz
4. Marhalah al-Bulugh

¹⁰³Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 400

¹⁰⁴Gemala Dewi dkk, *Op. Cit.*, h. 49-50

¹⁰⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Op. Cit.*, h.145

5. Marhalah al-Rushd.¹⁰⁶

Adapun persyaratan bagi orang yang melakukan akad (*aqid*) mempunyai *ahliyah* dan *wilayah* maka hukumnya ada tiga, yaitu:

- 1) Apabila *aqid* mempunyai *ahliyah al-ada'* *kamilah* dan mempunyai *wilayah* (kewenangan) untuk melakukan akad maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan (*Nafiz*).¹⁰⁷
- 2) Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki *ahliyah* dan *wilayah* (kewenangan) sama sekali maka akadnya menjadi batal.
- 3) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada'* *kamilah*, tetapi tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut *fudhuli*, hukum akadnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan orang yang memiliki barang.¹⁰⁸

b. Objek akad (*Mahal Al-'Aqd/Al-Ma'qud Alaih*)

Mahal Al-'Aqd adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Syarat objek akad, yaitu:

- 1) Telah ada pada waktu akad diadakan
- 2) Dibenarkan oleh nash
- 3) Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak yang berakad
- 4) Dapat diserahkan pada akad terjadi.¹⁰⁹

c. Akad (*Sighat*)

¹⁰⁶Gemala Dewi dkk, *Op. Cit.*, h. 52-53

¹⁰⁷Rosalinda, *Op. Cit.*, h. 48

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 49

¹⁰⁹Fathurraman Djamil, *Op. Cit.*, h. 34-37

Pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*).

Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu, dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah madzhab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka, *ijab* adalah yang diucapkan sebelum *qabul*, baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya. *Ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan, sementara *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan.¹¹⁰

d. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'aqd*)

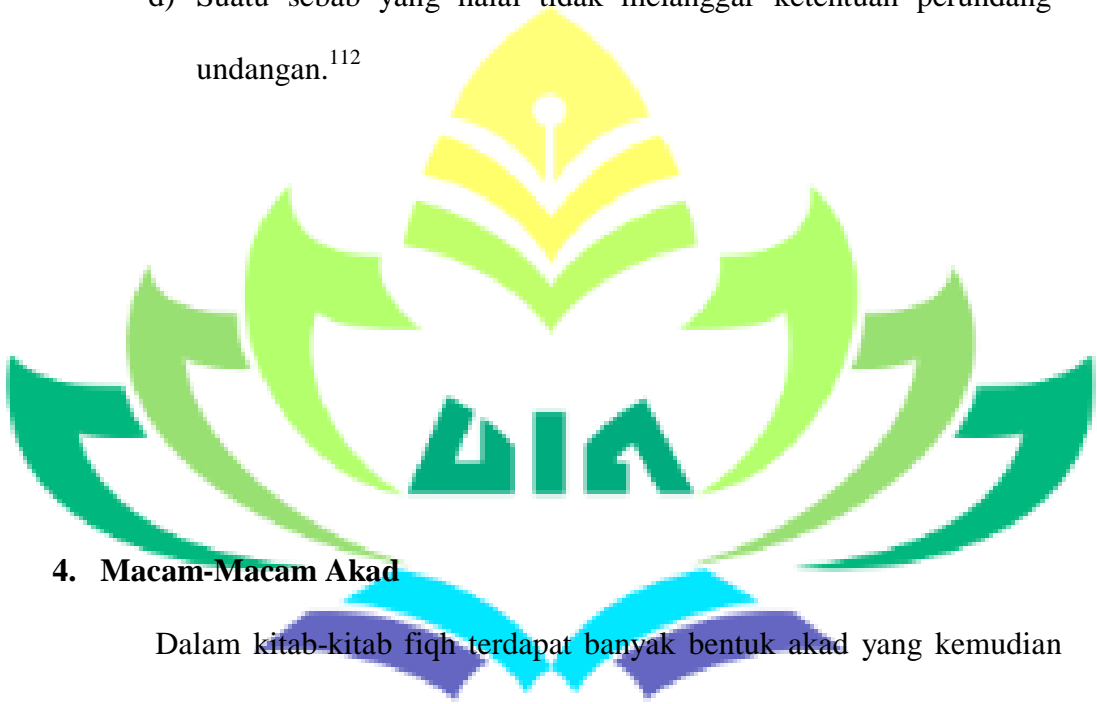
Syarat akad atau *Maudhu' al-'aqd* atau dalam hukum perjanjian disebut "Prestasi". Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti atau bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhud*) tanpa ganti (*iwadh*) dan akad sewa (*ijarah*) ialah memberi manfaat dengan ganti (*iwadh*).¹¹¹

¹¹⁰ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Sahwi, *Op. Cit.*, h. 29

¹¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, *Op. Cit.*, h. 147

Dari uraian tentang rukun dan syarat akad di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu mengenai objek perjanjian harus jelas; dan
- d) Suatu sebab yang halal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.¹¹²



4. Macam-Macam Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan akad ini pun terdapat banyak penggolongan-Nya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:¹¹³

- a) Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada *aqad shahih* dan *aqad ghairu shahih*:

¹¹²Wangsawidjaja, *Op. Cit.*, h. 133

¹¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, *Op. Cit.*, h. 76

1) *Aqad shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. *Aqad shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

a. *Nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk akad tersebut. *Aqad nafiz* terbagi kepada: *aqad lazim* dan *aqad mauquf* ;

Lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad. Akad *lazim* (mengikat para pihak) terbagi pada:

- 1) Akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan.
- 2) Akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan oleh kedua pihak.
- 3) Akad *lazim* (mengikat) terhadap satu pihak saja.

b. *Mauquf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.¹¹⁴

2) *Aqad ghairu shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Ulama Hanafiyah membagi akad *ghairu shahih* kepada *akad batil* dan *fasid*.

a. *Akad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya.

¹¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Setor, Op. Cit.*, h. 56

b. *Akad fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat.

Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Terhadap akad *fasid* wajib difasakhkan, baik oleh salah seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut dilarang secara syar'i. *Fasakh* dapat dilakukan dengan syarat:

1) Barang yang menjadi objek akad masih ada atau utuh.

Apabila barang telah rusak atau berubah, maka tidak dapat dilakukan.¹¹⁵

2) Barang yang menjadi akad tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Apabila objek akad berhubungan dengan orang lain, maka *fasakh* tidak berlaku.

Akad *batil* terlarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad *fasid* terlarang karena adanya sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatukan dengan akad maka hukumnya *maruh tahrir*. Seperti jual beli *an-najas*, *talaqi ar-rukban*, jual beli pada waktu azan jum'at.¹¹⁶

b) Akad menurut tujuan terbagi atas dua jenis:

1) Akad *Tabarru'* adalah akad yang memang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan

¹¹⁵*Ibid.*, h. 58

¹¹⁶*Ibid.*, h. 59

pahala dari Allah SWT, dan sama sekali tidak ada unsur mencari *return* atau motif mencari keuntungan.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.¹¹⁷

c) Akad tidaknya bagian (*qismah*) pada akad, sehingga akad dibagi dua bagian:

1) Akad *Musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syarat dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, *ijârah*; dan

2) Akad *Ghair Musammah*, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syariah dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.¹¹⁸

d) Dilihat dari segi objek, akad dibagi dua:

1) Akad '*ainiyah*', yaitu akad yang sah jika terjadi serah terima objek akad.

2) Akad *Ghoiri* '*ainiyah*', adalah akad yang menjadi sah dengan hanya *ijab qabul*.¹¹⁹

e) Dilihat dari segi maksud dan tujuan akad dapat dibedakan oleh beberapa hal, yaitu:

¹¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Op. Cit., h.77

¹¹⁸Ismail Nawawi, Op. Cit., h. 27-28

¹¹⁹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71

- 1) Kepemilikan;
 - 2) Menghilangkan kepemilikan;
 - 3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya;
 - 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila; dan
- Penjagaan.¹²⁰

5. Akibat Hukum Akad

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad tersebut belum dilaksanakan. Akad yang belum dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *mauquf*. Untuk dapat melakukan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.¹²¹

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari akad yang telah dibuat atau dilaksanakan, yaitu:

- a. Semua akad secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.

¹²⁰Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 29

¹²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.

- b. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sudat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah.
- c. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
- d. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang, jika pihak yang berhutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.¹²²

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila telah tercapainya tujuan dan atau terjadinya pemutusan berakad.¹²³ Selain itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa satu akad dapat berakhir apabila:

- a) Berakhirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b) Dibatalkan salah satu pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika;
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, khiyar rukyah.
 - 3) Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹²⁴

¹²²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Op. Cit.*, h. 151

¹²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, h. 100

C. Tinjauan Umum Barang Bertuah

1) Pengertian Barang Bertuah

Membahas mengenai barang bertuah atau benda magis hampir selalu di kait-kaitkan dengan kata-kata mitos, religi, mistik, dan lain sebagainya. Yang di maksud dengan barang bertuah atau benda magis di antaranya: mustika, geliga, akik, batu permata, fosil, azimah, Keris, tombak, tongkat, dll. Keberadaan benda-benda tersebut merupakan suatu tanda kebesaran Tuhan. Beberapa barang bertuah (*azimat*) yang memang berkekuatan magis yang memiliki kekuatan secara alami dari benda tersebut seperti halnya khodam penjaga dan ada pula berupa isian atau yang diasmak (dirajah), kesemuanya itu baik tergantung dari niat dan kebutuhan.¹²⁵

Sebagaimana dimaklumi bahwa azimat (*tamimah*) merupakan benda yang dijadikan sebagai penangkal dari suatu penyakit, mara bahaya ataupun sesuatu yang ditakutkan. Dalam kamus Mukhtar al-Shihah, disebutkan *tamimah* adalah pelindung yang digantungkan pada manusia. Al-Manawi menyebutkan, *tamimah* ini asalnya adalah tenunan yang digantung oleh orang Arab pada kepala anak-anak untuk melindunginya dari penyakit '*ain*, kemudian istilah ini digunakan untuk setiap benda yang dijadikan sebagai penangkal.¹²⁶

¹²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h. 108-109

¹²⁵Majelis Sulthan Aulia, *Menyikapi Benda Bertuah* (On-line), Tersedia di: <http://mawarqodiriyah.blogspot.com/2012/01/artikel-benda-bertuah.html>. (29 Januari 2015).

¹²⁶Tgk Alizar Usman, *Penggunaan Azimat Dalam Pandangan Islam* (On-line), Tersedia di: <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2014/06/penggunaan-azimat-dalam-pandangan-islam.html>. (04 Juni 2014).

Dalam perkembangannya, yang dimaksud barang bertuah (*azimat*) adalah segala benda yang dipercaya dan diyakini memiliki berkah untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun jimat tidak terbatas pada bentuk dan kasus tertentu akan tetapi mencakup semua benda dari bahan apapun dan bagaimanapun cara pakainya.¹²⁷

Sedangkan dalam artikel lain (*on-line*), *tamimah* adalah sesuatu yang dikalungkan, diikatkan pada tangan, dipakai sebagai sabuk, diselipkan pada kopyah, atau digantungkan di dekat pintu rumah, pada mobil, atau semisalnya dengan anggapan bahwa ia adalah sebab dalam mencegah bahaya atau mendatangkan kemanfaatan. (Disarikan dari penjelasan Syaikh Sholih bin Abdil Aziz Aalu Syaikh dalam at-Tamhiid lisyarhi Kitaabit Tauhid). Dalam bahasa Indonesia banyak disebut dengan *jimat*.¹²⁸

Adapun proses terkirimnya suatu kekuatan energi pada suatu benda bertuah yang alami maupun benda yang diisi kekuatan sehingga dapat menjadi sesuatu benda yang memiliki daya tuah khusus, ada beberapa faktor dan dapat melalui beberapa mekanisme antara lain sebagai berikut :

- 1) Benda yang berasal dari di alam gaib yang diciptakan Tuhan memiliki berkah.
- 2) Benda yang berasal batu alam atau batu proses alami yang diciptakan Tuhan memiliki berkah.

¹²⁷Mutiara Hikmah, *Adakah Jimat Dalam Islam?* (On-line), Tersedia di: <http://dakwahmutiarahikmah.blogspot.com/2013/08/adakah-jimat-dalam-islam.html> (23 Agustus 2013).

¹²⁸WebAdmin, oleh: Al-Ustadz Khasrisman, *Kitabut Tauhid Bab Hal-Hal Terkait Ruqyah dan Tamimah* (On-line), Tersedia di: <https://salafy.or.id/blog/2012/02/01/kitabut-tauhid-bab-hal-hal-terkait-ruqyah-dan-tamimah/>. (01 Februari 2012).

- 3) Benda yang berasal dari binatang yang diciptakan Tuhan memiliki berkah.
- 4) Benda yang berasal dari tumbuhan yang diciptakan Tuhan memiliki berkah.
- 5) Benda yang melalui proses pengisian secara alami yang memiliki berkah.
- 6) Benda yang keberadaannya pada waktu dan asal yang tidak biasa atau langka yang memiliki berkah.
- 7) Benda yang melalui proses pengisian secara aktif yang memiliki berkah.
- 8) Benda yang berasal dari isian seseorang yang memiliki berkah.
- 9) Benda yang berasal dari rajahan seseorang yang memiliki berkah.¹²⁹

Dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya orang yang memiliki atau menyimpan benda yang berkekuatan magis di sebabkan karena ada beberapa faktor:

- 1) Benda tersebut hanya mempusakai, mewarisi begitu saja, tanpa tahu maksud dan tujuannya.
- 2) Mewarisi yang di sertai dengan pesan-pesan mengenai tujuan cara petunjuk memakainya dan memeliharanya.
- 3) Pendapat dari pembelian, pemberian atau menemukan dengan tahu atau tanpa tahu maksud dan tujuannya. dll.¹³⁰

¹²⁹Majelis Sulthan Aulia, *Op. Cit.*,

¹³⁰*Ibid.*,

Berikut hadist-hadist Nabi SAW yang menggunakan perkataan “*tamimah*” serta penjelasan hukum menggunakannya, antara lain:

1. Mewartakan kepada kami Ayyub bin Muhammad Ar-Raqiy, mewartakan kepada kami Mu’ammarr bin Sulaiman, mewartakan kepada kami ‘Abdullah bin Bisyr, dari Al-A’masy, dari ‘Amr bin Murrah, dari Yahya bin Al-Jazar, dari putra saudara perempuannya Zainab, yaitu istri ‘Abdullah, dari Zainab. Dari ‘Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَالَءَ شِرْكٌ

Artinya: “*Sesungguhnya jampi-jampi dengan nama berhala dan Setan, azimat dan tiwalah adalah suatu perbuatan orang-orang musyrik*”.¹³¹

2. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَّعَ فَلَا وَدَّعَ اللَّهُ لَهُ

Artinya: “*Barangsiapa yang menggantungkan (hati) pada tamimah (jimat), maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barangsiapa yang menggantungkan dirinya pada kerang, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan.*”

¹³¹ Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*, No. Hadits: 3530 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hal. 297-298

(H.R. Ahmad) (Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Maktabah Syamilah, Juz. XXVIII, Hal. 623, No. Hadits : 17404).¹³²

3. Dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan tamimah (jimut), maka ia akan berbuat syirik.” (H.R. Ahmad) (Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Maktabah Syamilah, Juz. XXVIII, Hal. 637, No. Hadits : 17422).¹³³

Ketiga hadist di atas, menjelaskan kepada kita bahwa menggunakan azimat merupakan perbuatan tercela, bahkan merupakan perbuatan syirik berdasarkan hadist dan kedua. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah Ta’ala atau mengi’tiqad sesuatu selain Allah mempunyai kekuatan yang sama dengan-Nya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau seseorang menggunakan *azimat* tanpa ada *i’tiqad* azimat tersebut dapat memberi pengaruh melindungi dirinya secara mandiri (*ta’tsir*), tetapi azimat itu hanya sekedar sebagai sebab adanya perlindungan, dimana pada hakikatnya hanya Allahlah yang melindunginya? Bukankah ini sama halnya dengan kita menggunakan obat dari seorang dokter, kalau kita mengi’tiqad obat tersebut yang menyembuhkannya secara mandiri, tentu ini tanpa diragukan dapat disebut sebagai syirik, sebaliknya kalau dii’tiqadkan hanya sebagai sebab, dimana

¹³²Tgk Alizar Usman, *Op. Cit.*,

¹³³*Ibid.*,

pada hakikatnya hanya Allah-lah yang mengobatinya, maka tentu tidak seorangpun dapat mengatakan ini sebagai syirik, bahkan termasuk dalam kategori usaha yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya.

Apabila telah kita pastikan apabila menggunakan azimat tanpa ada i'tiqad azimat tersebut dapat memberi pengaruh melindungi dirinya secara mandiri (*ta'tsir*) bahkan syirik yang diharamkan, lalu kenapa Rasulullah SAW mengatakan penggunaan azimat merupakan perbuatan syirik sebagaimana dua hadist di atas? Menjawab pertanyaan ini marilah kita simak keterangan-keterangan para beberapa Ulama mu'tabar mengenai ini, sebagai berikut:

1) Qadhi 'Iyadh mengatakan:

“Rasulullah SAW menamakannya sebagai syirik, karena yang ma'ruf pada zaman beliau adalah ruqyah, azimat dan pelet yang dikenali pada zaman Jahiliyah, yakni mengandung unsur-unsur syirik, atau mengambilnya sebagai penangkal menunjukkan adanya i'tiqad memberi bekas (ta'tsir) yang menyebabkan kepada syirik.” (Al-Manawy, **Faidul Qadir**, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 341).¹³⁴

2) Imam al-Thaiby mengatakan:

“Karena orang Arab mengi'tiqad memberi bekas dan mengqashad dengan ruqyah, azimat dan pelet untuk menolak takdir yang telah ditentukan untuknya, maka mereka meminta terlindung dari mara bahaya dari selain Allah Ta'ala, seperti itulah, i'tiqad orang-orang Jahiliyah. Karena itu, tidak masuk yang demikian itu yang disebut dengan nama-nama Allah dan kalam-Nya dan tidak termasuk juga orang-orang yang menggantungkannya dengan dzikir kerana mencari berkah serta menyakini bahwa tidak ada yang dapat membuka kecuali Allah, maka ini tidak mengapa.” (Al-Manawy, **Faidul Qadir**, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 341).¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.*,

¹³⁵ *Ibid.*,

- 3) Ibnu Mulaqqan dalam mengomentari hadist pertama di atas mengatakan:

“Maksudnya itu adalah ruqyah Jahiliyah dan sihir yang sama dengannya berupa ruqyah yang tercela.” (Ibnu Mulaqqan, ***al-Taushih li Syarh al-Jami’ al-Shahih***, Wazarah al-Auqaf al-Syu-un al-Islamiyah, Qathar, Juz. XXVII, Hal. 492).¹³⁶

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ruqyah dan azimat yang dihukum tercela dan syirik penggunaannya dalam hadits-hadits di atas dan yang tersebut dalam hadits-hadits lain yang tidak kami sebut di sini adalah ruqyah dan azimat yang mengandung unsur-unsur syirik di dalamnya atau ada *i’tiqad ta’tsir* (memberi bekas) pada selain Allah Ta’ala sebagaimana yang lazim terjadi pada zaman awal kemunculan Islam (zaman Jahiliyah). Sehingga dengan keterangan ini pula dapat dipahami kalau Rasulullah dalam banyak riwayat pernah melakukan ruqyah dan menganjurkannya sebagaimana hadits-hadits yang akan kami kemukakan sesudah ini.

- 1) Hadits-hadits yang membolehkan menggunakan ruqyah selama tidak ada unsur syirik:

a. Dari Aisyah r.a, beliau mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ، تَرَبُّهُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا

¹³⁶*Ibid.*,

Artinya: Apabila ada orang-orang mengadu hal kepada Rasulullah

SAW atau beliau mengalami penyakit kudis atau luka,
maka beliau menjampinya dengan ucapan :

بِاسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا،
بِإِذْنِ رَبِّنَا

sambil menggunakan telunjuk beliau seperti ini. Sufyan

(perawi hadits ini) meletakkan telunjuknya di atas tanah,

kemudian mengangkatnya. (H.R. Muslim) (Imam

Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah, Juz. IV,

Hal. 1724, No. Hadits : 2194).¹³⁷

b. Hadits Utsman bin Abi al-‘Ash al-Tsaqafi berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ التَّقْفِيِّ، أَنَّهُ شَكََا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

Artinya: “Dari Ustman bin Abi al-‘Ash al-Tsaqafi, sesungguhnya beliau mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang penyakitnya yang didapati pada tubuhnya selama masuk Islam, lalu Rasulullah Saw mengatakan kepadanya, “Letakkan tanganmu atas penyakit yang kamu derita di atas badanmu dan katakanlah: “Bismillah tiga kali dan tujuh kali ucapan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

(H.R. Muslim) (Imam Muslim, *Shahih Muslim*,

Maktabah Syamilah, Juz. IV, Hal. 1728, No. Hadits : 2202).¹³⁸

Dalam dua hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa ruqyah yang
dibolehkan itu ada yang menggunakan benda sebagai simbolik

¹³⁷ Ibid.,

¹³⁸ Ibid.,

(*tafa-ul*), pada hadits **pertama** dengan menggunakan tanah, sedangkan hadits **kedua** menggunakan tangan. Ruqyah ada juga tanpa menggunakan simbol apa-apa, tetapi hanya dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tertentu.

2) Azimat merupakan ruqyah dengan menggunakan simbol-simbol (*tafa-ul*)

Azimat dengan membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an tertentu atau zikir-zikir tertentu pada suatu benda, lalu digantung pada tubuh seseorang dengan harapan menjadi berkah dan terlindungi dari penyakit dengan izin Allah Ta'ala merupakan ruqyah yang dibenarkan dalam agama. Hal itu, karena ia merupakan ruqyah dengan menggunakan simbol-simbol (*tafa-ul*). Sebaliknya, apabila yg ditulis mengandung unsur-unsur syirik, maka itu adalah azimat yang diharamkan agama.

Berikut ini keterangan syara' yang membolehkan menggunakan suatu benda untuk mengambil berkah (*tabarruk*), antara lain :

- a. Nabi SAW memberkati dengan air yang telah disentuhnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits sebagai berikut :

قَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا

Artinya: "Berkata Abu Musa: "Nabi Muhammad SAW meminta semangkok air, lalu beliau mencuci kedua tangannya dan membasuh wajahnya di dalamnya, dan mengeluarkan air dari mulutnya, kemudian bersabda kepada mereka berdua (dua orang sahabat yang ada di sisi beliau, "Minumlah dari air itu dan semburlah pada wajah dan lehermu." (H.R. Bukhari) (Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Thauq an-Najh, Juz. I, Hal. 49, No. Hadits : 188).¹³⁹

¹³⁹ *Ibid.*,

- b. Tabarruk Nabi Ya'kub a.s. dengan baju qamis anaknya, Nabi Yusuf untuk kesembuhan matanya, sebagaimana diceritakan Allah dalam firman-Nya, Q.S. Yusuf: 93

أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا
وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: *"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku."* (Q.S. Yusuf : 93)

Mata Nabi Ya'kub sembuh seketika pada saat wajah beliau menyentuh qamis Nabi Yusuf , sebagaimana kisah selanjutnya dalam firman Allah:

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: *"Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui tentang Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya."* (Q.S. Yusuf : 96)

- 3) Haram azimat dengan tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya karena dikuatirkan ada unsur syirik. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW, antara lain:
- a. Hadits berbunyi:

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الرُّقَى حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَتْ الرُّقَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ كَلَامِ الشِّرْكِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَدَعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ آلُ حَزْمٍ يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَةِ فَلَمَّا نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى تَرَكُوهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِي عُمَارَةَ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ فَقَالَ اعْرِضْ عَلَيَّ رُفَيْتَكَ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِ بِهَا بَأْسًا وَأَذِنَ لَهُمْ بِهَا

Artinya: “Sesungguhnya mereka mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah melarang ruqyah sehingga tiba di Madinah, pada ketika itu, ruqyah banyak terdiri dari kalam syirik. Tatkala salah seorang sahabat Nabi disengat binatang berbisa, mereka mengatakan kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, orang-orang Hazam terbiasa melakukan ruqyah karena sakit panas, tetapi manakala engkau melarangnya, mereka pun meninggalkannya. Rasulullah SAW berkata, “Panggillah ‘Umarah kepadaku.”(Umarah ini pernah ikut perang Badar), kemudian Rasulullah berkata kepada Umarah, “Nampakkanlah ruqyahmu kepadaku!”, Kemudian Umarahpun memperlihatkankannya, lalu Rasulullah SAW tidak melihat ada masalah dengan ruqyah tersebut, maka beliau mengizinkan mereka menggunakan ruqyah tersebut.” (H.R. Ibnu Wahab) (Ibnu Mulaqqan, *al-Tauzhih li Syarh al-Jami’ al-Shahih*, Wazarah al-Auqaf al-Syu-un al-Islamiyah, Qathar, Juz. XXVII, Hal. 492).¹⁴⁰

Riwayat ini selengkapnya juga disebut dalam kitab al-Tamhid karangan Ibnu Abd al-Bar. (Ibnu Abd al-Bar, *al-Tamhid*, Maktabah Syamilah, Juz. XXIII, Hal. 155).¹⁴¹

b. Dari ‘Auf bin Malik al-Aysja’i, beliau berkata :

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟
فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

Artinya: “Pada zaman Jahiliyah, kita selalu melakukan ruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana

¹⁴⁰ Ibid.,

¹⁴¹ Ibid.,

*pendapatmu ya Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah menjawab: “Coba tunjukkan azimatmu itu padaku. Membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan.” (H.R. Muslim) (Imam Muslim, **Shahih Muslim**, Maktabah Syamilah, Juz. IV, Hal. 1727, No. Hadits : 2200).*¹⁴²

2) Macam-Macam Barang Bertuah

Secara umum, *azimat* terbagi menjadi dua macam:

1) *Azimat* yang tidak bersumber dari Al-Qur'an. *Azimat* jenis inilah yang dilarang oleh syariat Islam. Jika seseorang percaya bahwa *azimat* itu dapat berpengaruh tanpa kehendak Allah maka ia terjerumus dalam perbuatan syirik besar karena hatinya telah bersandar kepada selain Allah. Adapun jika seseorang meyakini bahwa *azimat* itu hanya sebagai sebab dan tidak memiliki kekuatan sendiri maka ia terjatuh dalam perbuatan syirik kecil.

2) *Azimat* yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada sebagian yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Adapun pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah terlarang, meskipun hukumnya tidak syirik karena menggunakan Al-Qur'an disini berarti bersandar pada kalamullah bukan bersandar kepada makhluk. Mengapa dilarang? Karena keumuman dalil tentang keharaman jimat, tidak peduli jimat tersebut berupa Al-Qur'an ataupun bukan. Pemakaian jimat dari Al-Qur'an juga mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, yaitu ketika dibawa tidur, buang hajat, atau sedang berkeringat dan semacamnya. Hal seperti ini tentu

¹⁴²*Ibid.*,

bertentangan dengan kesucian Al-Qur'an. Selain itu juga, jimat ini dapat pula dimanfaatkan oleh para pembuatnya untuk menyebarkan kemusyrikan dengan alasan jimat yang dibuatnya dari Al-Qur'an.¹⁴³



¹⁴³Mutiara Hikmah, *Op. Cit.*,

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mulya Kencana

Tiyuh Mulya Kencana asal usulnya adalah Desa penempatan Transmigrasi tahun 1974/1975, yang berasal dari Pulau Jawa yang terdiri dari:

1. Integrasi ABRI Diponegoro 40 KK tahun 1974
2. Yogyakarta (Trans DBB) Transmigrasi dengan bantuan 141 KK
3. Bandung (DBB) 70 KK
4. Jember (DBB) 37 KK
5. Purwodadi 50 KK
6. Banyumas 60 KK
7. Semarang 78 KK
8. Banyuwangi 76 KK
9. Medun 58 KK
10. Kediri 84 KK
11. Surakarta 30 KK
12. Kebumen 24 KK
13. Total penempatan awal 758 KK

Perkembangan dari tahun ke tahun sampai tahun 2014 jumlah KK 1.415 dan jumlah jiwa 4.743 jiwa.

Setelah usia masa pembinaan oleh proyek Transmigrasi pada tahun 1974-1984 yang awalnya dipimpin oleh Bapak Prapto Wiyono, selaku koordinator Rukun Kampung (RK) 1974-1976. Bapak Sumarto 1976-1977. Bapak

Sulaiman 1977. Bapak K.Sudaryo 1977-1978 (Kepala Desa Persiapan), Bapak K.Sudaryo 1978-1998 (sebagai Kepala Desa Devintif) hasil pemilihan. Koordinator Rukun Kampung yang pada tahun 1974-1977 bekerja sama dengan seorang Ka.Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT), Bapak Sutarjo.BA menjabat KUPT dan pada tahun 1977-1979. Bapak Sunarno.BA. tahun 1979-1984. Bapak Mulyono.BA. dari binaan KUPT tahun 1984 diserahkan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara dengan Kepala Desa Bapak K. Sudaryo 1984-1998, pada tahun 1998-2006 Kepala Kampung dijabat oleh Bapak Ryan Purwanto pada masa tersebut pada tahun pada tahun 2002 nama Desa menjadi nama Kampung hingga saat sekarang ini dengan nama Kampung Mulya Kencana, tahun 2006-2007 Bapak Isrofi sebagai pejabat Kepala Kampung tahun 2007-2012 Kepala Kampung dijabat oleh Bapak Totok Ismanto pada periode ini terjadi pemekaran kampung pada akhirnya tahun 2008 pada tanggal 31 Desember menjadi Kampung Mulya Kencana dan Kampung Mulya Jaya yang awalnya Kampung Mulya Kencana terdiri dari 8 Suku dengan adanya pemekaran Tiyuh Menjadi 5 Suku. Dengan luas Wilayah awalnya 1.832,75 Ha sekarang menjadi 1.065 Ha.

Dengan batas awalnya:

Timur	: Kampung Ujung Gunung Ilir
Barat	: Kampung Pulung Kencana
Utara	: Kampung Tirta Kencana
Selatan	: Kampung Candra Kencana

Batas setelah ada pemekaran hingga sekarang batas Wilayah:

Timur : Kampung Kagungan Rahayu

Barat : Tiyuh Mulya Jaya

Utara : Tiyuh Tirta Kencana

Selatan : Tiyuh Candra Jaya

Sebelum Ibu Esa Ratnasari menjabat sebagai Kepala Tiyuh Mulya Kencana secara difinitif, pelaksana tugas Kepala Tiyuh dijabat oleh Bapak Isrofi. Pada tahun 2013 sampai Sekarang Kepala Tiyuh dijabat oleh Ibu Esa Ratnasari.¹⁴⁴

B. Letak Geografis Desa Mulya Kencana

Desa Mulya Kencana merupakan salah satu dari 19 Desa yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Sedangkan Tulang Bawang Tengah merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dilihat dari letak Geografisnya Desa Mulya Kencana berada pada ketinggian 29 Meter sampai 30 Meter di atas permukaan laut.

Jarak tempuh dari Desa ke Ibukota Kecamatan adalah kurang lebih 17 km, sedangkan jarak tempuh dari pusat Desa ke Ibukota Kabupaten adalah kurang lebih 23 km. Kalau jarak tempuh dari pusat Desa ke Ibukota Provinsi kurang lebih 120 km.

Luas wilayah Desa kurang lebih 1.065 hektar (Ha), dan peruntukannya kurang lebih 896,25 hektar sebagai lahan perkebunan, kurang lebih 55,50 hektar sebagai lahan perkarangan, kurang lebih 1,5 hektar sebagai lahan

¹⁴⁴RKP Desa Mulya Kencana

pemakaman, kurang lebih 0,5 hektar sebagai lahan perkantoran dan kurang lebih 55,50 hektar sebagai lahan pemukiman.¹⁴⁵

C. Pengertian Barang Bertuah di Desa Mulya Kencana

Jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) sudah menjadi budaya digolongan masyarakat tertentu. Menurut pembeli motivasi yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kegiatan muamalah adalah untuk koleksi barang peninggalan ataupun mencari keberkahan (*tabarruk*). Seperti penglaris dagangan, kewibawaan, keselamatan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) adapun beberapa pengertian barang bertuah (*azimat/tamimah*) di masyarakat Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat: Menurut ahli spiritual (penjual), Menurut Pembeli dan Menurut Tokoh Agama Masyarakat Desa. Ahli spiritual itu sendiri adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang ilmu magis atau goib.

Berdasarkan wawancara dengan mbah Borok ahli spiritual (penjual), menurutnya barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah barang yang berasal dari alam gaib yang memang memiliki kesaktian atau manfaat khusus bagi pemiliknya. Untuk barang bertuah (*azimat/tamimah*) menurutnya banyak jenis dan bentuk, di antaranya: keris, tusuk konde, kitab stambul, batu mustika, cincin mustika, dan masih banyak lagi.¹⁴⁶

¹⁴⁵*Ibid.*,

¹⁴⁶Mbah Borok (ahli spiritual atau penjual), Wawancara tanggal 28 Februari 2019 di Desa Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat

Selanjutnya dari hasil wawancara dari beberapa peminat atau orang yang pernah membeli barang bertuah menurutnya antara lain:

Bapak Sukardi, menurutnya barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah barang peninggalan atau warisan leluhur yang langka dan biasanya memiliki kekuatan gaib yang dapat dimanfaatkan pemiliknya.¹⁴⁷

Bapak Santoso, menurutnya barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah suatu barang yang terdapat makhluk gaib yang selalu diambil manfaatnya.¹⁴⁸

Bapak Sumarji, menurutnya barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah barang peninggalan sejarah yang memiliki berbagai manfaat untuk pemiliknya.¹⁴⁹

Bapak Sarjono, menurutnya barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah suatu barang yang memiliki kekuatan mistis yang dapat digunakan penggunaannya.¹⁵⁰

Selain pengertian di atas, adapun hasil wawancara singkat menurut tokoh agama tentang barang bertuah (*azimat/tamimah*).

Bapak Nurul Huda, menurutnya barang bertuah (*azimat/tamimah*) merupakan sesuatu barang yang memiliki kekuatan khusus atau dianggap dapat memberikan manfaat terlepas dari syariat agama.¹⁵¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah barang atau benda yang berasal dari alam gaib yang

¹⁴⁷Sukardi (pembeli), Wawancara tanggal 25 Februari 2019 di Desa Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat

¹⁴⁸Santoso (pembeli), Wawancara tanggal 25 Februari 2019 di Desa Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat

¹⁴⁹Sumarji (pembeli), Wawancara tanggal 27 Februari 2019 di Desa Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat

¹⁵⁰Santoso (pembeli), Wawancara tanggal 26 Februari 2019 di Desa Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat

¹⁵¹Nurul Huda (Tokoh Agama Desa), Wawancara tanggal 22 April 2019 di Desa Mulya Kencana, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat

mempunyai kekuatan magis yang dimanfaatkan oleh beberapa golongan orang terlepas dari syariat.

D. Akad Jual Beli Barang Bertuah

Dalam wawancara singkat dengan ahli spiritual (penjual), menurutnya akad transaksi jual beli barang bertuah dilakukan dengan cara menyesuaikan kebutuhan yang diminta oleh pembeli atau dapat dengan kata lain harus mencari terlebih dahulu, misalnya terdapat pembeli yang meminta barang bertuah yang dapat menarik pembeli untuk dagangan (penglaris). Selanjutnya, beliau menuturkan meminta mahar sejumlah uang untuk persyaratan mencari barang bertuah yang diminta. Setelah beliau mendapatkan barang yang sesuai beliau menyerahkannya dengan akad pemaharan yang diawal yang diikuti penyerahan barang.¹⁵²

Berdasarkan dari hasil wawancara singkat dengan ahli spiritual (penjual) dapat disimpulkan bahwa akad jual beli barang bertuah dilakukan dengan cara pemesanan, yang disertai pemberian sebagian mahar untuk mencari barang yang diminta pembeli. Dalam hal ini, ahli spiritual melakukan beberapa ritual khusus untuk mendapatkan barang dari alam goib atau merajah sendiri sesuai permintaan pembeli.

¹⁵²Mbah Borok, *Op. Cit.*,

E. Penetapan Harga Barang Bertuah

Penetapan harga barang adalah hal yang penting dalam transaksi jual beli tidak terkecuali transaksi jual beli barang bertuah. Penetapan harga barang bertuah sendiri, menurut ahli spiritual (penjual) hanya meminta mahar sejumlah uang yang diikuti dengan jumlah mahar barang tersebut, misalnya sebuah keris dapat dimahari sejumlah uang Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 tergantung dari ahli spiritual (penjual) menyebutkan jumlah mahar yang diminta.¹⁵³

Menurut ahli spiritual (penjual) dan penambahan kata-kata dari penulis agar mudah dipahami, menurutnya kata *mahar* yang dimaksud adalah maskawin untuk memiliki barang bertuah tersebut atau dalam artian sebagai penetapan suatu harga barang bertuah yang biasa digunakan untuk memberitahukan harga yang diminta.¹⁵⁴

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *mahar* ini merupakan penetapan suatu harga untuk barang bertuah yang diperjualkan, dengan alasan ahli spiritual untuk menghormati barang bertuah tersebut. Maka kata *mahar* sebagai pengganti nilai tukar atau harga suatu barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dipercaya untuk mengikat antara pembeli dengan barang bertuah tersebut. Dengan kata lain untuk ikatan antara pembeli sebagai tuan dengan tuah (penghuni) barang tersebut. Maka kata *mahar* tersebut untuk menghargai tuah (penghuni) barang bertuah agar menjalin hubungan dengan pembeli.

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ *Ibid.*,

F. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Barang Bertuah di Desa Mulya Kencana


Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tentang praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*). Menurut hukum praktik jual beli barang bertuah tidak boleh, jangankan diperjualbelikan memberikannya atau menerimannya hukumnya tidak boleh.¹⁵⁵

Kemudian beliau menjelaskan tentang penggunaan bahasa mahar dalam kegiatan mu'amalah khususnya transaksi jual beli sebagai penentuan harga berupa uang ataupun barang yang memiliki nilai tukar yang sama atau lebih tinggi dari barang yang diperjualbelikan. Adapun dari hasil wawancara dengan tokoh agama berkaitan dengan hukum penggunaan bahasa mahar untuk jual beli.

Menurutnya penggunaan bahasa mahar dalam muamalah hukum asalnya itu boleh secara umum hanya saja secara bahasa kurang tepat, karena mahar itu menurut beliau adalah sebuah istilah untuk *shadaq* yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan didalam akad nikah. Sedangkan jika penggunaannya untuk sebagai sesuatu yang digunakan untuk membeli atau menjual maka itu tidak tepat. Jadi hukum penggunaan bahasa mahar untuk jual beli itu boleh tapi tidak tepat secara bahasa. Sedangkan, penggunaan istilah mahar dalam jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah bentuk *talbis* atau pengkaburan untuk menghalalkan hal yang jelas dilarang.

¹⁵⁵Nurul Huda, *Op. Cit.*,

Selanjutnya, pandangan beliau tentang pembeli yang membeli barang bertuah sebagai koleksi hukumnya tidak boleh, karena ditakutkan ia akan menyakini bahwa azimat atau tamimah tersebut dapat memberi manfaat atau mudharat selain Allah dan ini akan termasuk perbuatan syirik. Sedangkan, berdasarkan pendapat beliau menurut hukum Islam memanfaatkan barang bertuah hukumnya adalah syirik besar. Karena, ia meminta pertolongan kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah [1] ayat ke 5:



إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: *“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kamu memohon pertolongan”*.

Allah juga berfirman dalam surat Al-An’am [6] ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Artinya: *“Katakan (Muhammad): marilah Aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun”*.¹⁵⁶

¹⁵⁶*Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Barang Bertuah (*Azimat/Tamimah*)

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) yang dilakukan mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melakukan jual beli barang bertuah dengan cara akad pemaharan, yaitu peminat (pembeli) memahar sejumlah uang yang diminta ahli spiritual untuk mendapatkan barang bertuah yang diminta. Kemudian, penggunaan bahasa *mahar* sendiri berdasarkan pada Bab III halaman 77, menurut ahli spiritual kata *mahar* yang dimaksud adalah maskawin untuk memiliki barang bertuah tersebut atau dalam artian sebagai penentuan harga yang biasanya memang digunakan untuk memberitahukan harga yang diminta. Dalam hal ini dipercaya untuk mengikat antara pembeli dengan barang bertuah tersebut. Dengan kata lain untuk ikatan antara pembeli sebagai tuan dengan tuah (penghuni) barang tersebut. Maka kata *mahar* tersebut untuk menghargai tuah (penghuni) barang bertuah agar menjalin hubungan dengan pembeli.

Dalam praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) dengan penggunaan bahasa *mahar* untuk penetapan suatu harga. Menurut tokoh agama pada Bab III halaman 78, secara umum hukumnya boleh. Tetapi, secara bahasa kurang tepat. Karena, *mahar* adalah sebuah istilah untuk *shadaq* yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan di dalam akad nikah. Sedangkan, jika penggunaan bahasa *mahar* sebagai sesuatu yang digunakan

untuk membeli atau menjual maka itu tidak tepat. Jadi hukum penggunaan bahasa mahar untuk jual beli itu boleh tapi tidak tepat secara bahasa. Kemudian, jika penggunaan istilah *mahar* untuk penetapan suatu harga dalam praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah bentuk *talbis* atau pengkaburan untuk menghalalkan hal yang jelas dilarang.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Bertuah di Desa Mulya Kencana

Dalam bermua'malah khususnya jual beli transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena pada dasarnya merupakan unsur dari jual beli yang harus terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III halaman 74 terhadap praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) yang dilakukan Mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah pertama, sebagai koleksi, dan kedua, untuk diambil manfaatnya (*Tabbaruk*).

Kemudian, berdasarkan latar belakang terjadinya transaksi jual beli tersebut jika dilihat dari segi sebagai koleksi menurut rukun dan syarat barang dalam transaksi jual beli yang terdapat pada Bab II halaman 25-26 hukumnya boleh, karena barang bertuah (*Azimat/Tamimah*) bukanlah termasuk barang najis ataupun dinajiskan. Selain itu, barang (objeknya) dapat diserahterimakan pada waktu transaksi jual beli dan tidak terkait dengan hak orang lain. Dengan demikian, hukum praktik jual beli tersebut Sah dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Sedangkan, jika dilihat dari segi manfaat kebendaannya (untuk diambil manfaatnya) hukum transaksi jual beli tersebut Dilarang. Karena, termasuk dalam kaidah menarik maslahat. Kaidah ini adalah kaidah yang berkaitan dengan pilihan antara dua hal, yaitu menolak kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan. Kaidah cabang ini berbunyi:¹⁵⁷

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan itu didahulukan sebelum menarik kemaslahatan”.

Dalam redaksi lain kaidah ini berbunyi: *dar’ul mafasid aula min jalbil mashalikh* (menolak kerusakan itu lebih utama dibanding menarik kemaslahatan), yaitu dengan mengganti kata *maqaddamun* (didahulukan) dengan kata *aula* (lebih utama). Kedua kaidah ini menunjukkan pengertian yang sama, karena yang dimaksud *aula* (lebih utama) adalah lebih utama dan lebih berhak untuk didahulukan dari pada yang lain.¹⁵⁸

Kemudian, kedua kaidah ini dapat ditemukan landasan dalilnya dalam ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang manfaat dan mudarat minuman keras, Allah Swt berfirman:¹⁵⁹

¹⁵⁷M. Pudjihardjo dan Nur Fizi Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 135

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 136.

¹⁵⁹*Ibid.*, h. 138.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Minuman keras dan perjudian atau sejenisnya memang bisa mendatangkan kemanfaatan, khususnya bagi penjualnya, pengedarnya, atau bandarnya, akan tetapi minuman keras, perjudian, atau sejenisnya juga dapat menyebabkan kerusakan akal, pertengkaran dan permusuhan. Dengan demikian kerusakan-kerusakan inilah yang seharusnya dihindari terlebih dahulu, apalagi didalam ayat itu tegas kerusakan (dosa) yang disebabkan olehnya lebih besar dari kemanfaatannya.¹⁶⁰ Untuk menentukan dan menimbang besar kecilnya kemaslahatan dan kemudharatan tentu memerlukan pertimbangan yang matang dari seorang yang ahli dalam fiki, seperti mujtahid yang mampu membaca dan mendalami dalil-dalil syariah.¹⁶¹

Kaidah cabang ini dapat berlaku dalam jual beli, yaitu kasus dilarangnya jual beli barang-barang haram, seperti babi, daging anjing, minuman keras, alkohol dan sejenisnya. Meskipun jual beli barang-barang tersebut dapat mendatangkan keuntungan (kemaslahatan) ekonomi, akan tetapi kemudharatan dan kerusakan yang diakibatkannya dari jual beli tersebut jauh lebih besar dan

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 139.

kaidah fikih menolak kerusakan (kemudharatan) harus lebih diutamakan, sehingga jual beli barang-barang tersebut juga dilarang.¹⁶² Seperti halnya dengan barang bertuah (*azimat/tamimah*), jika berdasarkan kaidah di atas maka jelas praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) dengan alasan atau tujuan untuk mengambil manfaat (*tabbaruk*) hukumnya Haram.

Berdasarkan hasil analisa di atas, menurut pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) yang dilakukan mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat hukumnya boleh asal dalam transaksi jual beli bertujuan hanya sebagai koleksi. Namun, transaksi jual beli tersebut dapat menjadi dilarang, jika di niatkan untuk diambil manfaatnya atau dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemilik atau pembeli selain Allah SWT. Pelarangan tersebut karena berdasarkan pada kaidah fikih dan tujuan transaksi jual beli yang tidak dibenarkan syara' dan dapat berdampak buruk terhadap keimanan pembeli dan orang lain. Sebagaimana dalam Bab II halaman 61:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَالَءَ شِرْكٌ

Artinya: “*Sesungguhnya jampi-jampi dengan nama berhala dan Setan, azimat dan tiwalah adalah suatu perbuatan orang-orang musyrik*”.

¹⁶²*Ibid.*, h. 140.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian kemudian menguraikan dalam bentuk tulisan yang dimulai dari Bab I, II, III, dan IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pengertian barang bertuah (*azimat/tamimah*) dapat disimpulkan bahwa barang bertuah (*azimat/tamimah*) adalah barang atau benda yang berasal dari alam gaib yang mempunyai kekuatan magis yang dimanfaatkan oleh beberapa golongan orang terlepas dari syariat.
- 2) Berdasarkan hasil analisa di atas, menurut pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*) yang dilakukan Mbah Borok di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat hukumnya boleh, asal dalam transaksi jual beli bertujuan hanya sebagai koleksi. Namun, transaksi jual beli tersebut dapat menjadi dilarang, jika di niatkan untuk diambil manfaatnya atau dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya atau pembelinya. Pelarangan tersebut karena berdasarkan pada kaidah fikih dan tujuan transaksi jual beli yang tidak dibenarkan syara' dan dapat berdampak buruk terhadap keimanan pembeli dan orang lain. Sebagaimana dalam Bab II halaman 61:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَالَهَ شِرْكٌ

Artinya: “*Sesungguhnya jampi-jampi dengan nama berhala dan Setan, azimat dan tiwalah adalah suatu perbuatan orang-orang musyrik*”.

B. Saran

1. Bagi ahli spiritual (penjual) hendaknya tidak melakukan kembali praktik jual beli barang bertuah (*azimat/tamimah*), jika tujuan dari transaksi jual beli tersebut untuk dimanfaatkan atau dipercaya akan membawa keberuntungan, karena dari kemanfaatannya yang tidak dibenarkan oleh syara' dan haram bagi penjual memperjualbelikan barang yang dapat membawa orang lain dalam kerusakan iman akibat meminta pertolongan selain kepada Allah SWT.
2. Bagi pembeli hendaknya meluruskan tujuan membeli barang bertuah (*azimat/tamimah*). Membeli barang bertuah (*azimat/tamimah*) dengan tujuan atau mengharap keberuntungan dari barang tersebut tidak dibenarkan oleh syara'. Karena akan berakibat buruk yang kemudian dapat membawa dirinya dalam kemusrikan. Karena hanya kepada Allah SWT lah tempat menggantungkan segala sesuatu.

Daftar Pustaka

- Achmadi, C. N. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, M. (2003). *Ekonomi Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar.
- al-Fauzan, S. (2005). *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aljaziri, A. (2001). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Pers.
- al-Na'im, A. A. (2009). *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ash-Sahwi, A. a.-M. (2013). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- as-Sa'di, S. A. (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Azzam, N. F. (2015). *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Gemala Dewi, W. N. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. A. (1996). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanuddin, O. S. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2003). *FIqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Gramedia Persada.
- Muhith, M. P. (2017). *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priansa, B. A. (2014). *Menejemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riyadi, I. Y. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rozalinda. (2016). *FIkih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif.
- Shonhaji, A. (1993). *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih: Reflesi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Tausikal, M. A. (2013). *Panduan Fikih Muamalah: Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Tjitrosudibio, R. S. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Balai Pustaka.
- Wajdi, S. K. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zahrah, M. A. (2008). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Sumber Artikel (On-line):

Aulia, M. S. (2015, Januari 29). Menyikapi Benda Bertuah. *On-line*, Tersedia di: <http://mawarqodiriyah.blogspot.com/2012/01/artikel-benda-bertuah.html>.

Hikmah, M. (2013, Agustus 23). Adakah Jimat Dalam Islam? *On-line*, Tersedia di: <http://dakwahmutiarahikmah.blogspot.com/2013/08/adakah-jimat-dalam-islam.html>.

Usman, T. A. (2014, Juni 04). Penggunaan Azimat Dalam Pandangan Islam. *On-line*, Tersedia di: <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2014/06/penggunaan-azimat-dalam-pandangan-islam.html>.

WebAdmin, Oleh: al-Ustadz Khasrisman. (2012, Februari 01). Kitabut Tauhid Bab Hal-Hal Terkait Ruqyah dan Tamimah. *On-line*, Tersedia di: <https://salafy.or.id/blog/2012/02/01/kitabut-tauhid-bab-hal-hal-terkait-ruqyah-dan-tamimah/>.

Sumber Jurnal:

Maksum, M. (Juni 2014). Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah. *Ad-'Adalah*, 50. Tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>

